



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 232 dan pasal 294, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab II pasal 2 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 diamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD.

SKPD yg tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dibidang penanaman modal, adalah merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Neraca menyajikan asset, utang, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan pendapatan LO dan beban, yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional (LO). Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Guna menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Laporan Keuangan SKPD yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk petanggungjawaban pengelolaan keuangan DPMPTSP Kabupaten Batang selama satu periode tahun anggaran 2020.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan tahun Anggaran 2020.



B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan:

- a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);



- l) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- q) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- r) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- u) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- w) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020;
- x) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
- y) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
- z) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 14);



- aa) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 7);
- bb) Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 69);
- cc) Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2020 Nomor 81);
- dd) Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2020 Nomor 69);
- ee) Peraturan Bupati Batang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2020 Nomor 80).
- ff) Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13);

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2020 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Pendapatan LRA
 - 2. Belanja
- B. Neraca
 - 1. Aset
 - 2. Kewajiban
 - 3. Ekuitas
- C. Laporan Operasional
 - 1. Pendapatan LO
 - 2. Beban
 - 3. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional



D. Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Awal
2. Surplus / Defisit LO
3. Ekuitas Akhir

Bab IV Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.

Bab V Penutup.



BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Batang diklasifikasikan menjadi urusan wajib dan pilihan, dan di sajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

REALISASI PENDAPATAN URUSAN PEMERINTAH
BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

NO. REK	URUSAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SALDO	
				(Rp)	(%)
1	WAJIB	2,216,000,000	2,359,507,650	143,507,650	0.06
2	PILIHAN				

REALISASI BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
DPMPTSP KABUPATEN BATANG
TAHUN 2020

NO. REK	NAMA SATKER	ANGGARAN	REALISASI SALDO	%
1	URUSAN WAJIB	5,797,818,323	5,602,706,261	97,57%
2	URUSAN PILIHAN			
JUMLAH		5,797,818,323	5,602,706,261	

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan umum pemerintahan pada DPMPTSP Kabupaten Batang yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan
Dihitung secara keseluruhan untuk pendapatan tidak ada kendala terbukti dengan pendapatan melebihi target, terutama Retribusi IMTA, proyek PLTU masih dalam tahap pembangunan konstruksi hingga PT. BPI banyak memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Belanja
Secara umum hambatan dalam penyerapan belanja adalah sebagai berikut :
 - a. Selisih harga pagu dengan harga peroleh barang;
 - b. Dan adanya kesesuaian dengan kebutuhan.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca , Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun Pendapatan - LRA dan Belanja .
Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening umum kas daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih pada periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan pendapatan – LRA menggunakan basis kas,

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah.
Realisasi PAD Tahun 2020 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Pajak Daerah	-	-	
2 Hasil Retribusi Daerah	2,216,000,000	2,338,323,100	1,475,528,000
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	
4 Lain-lain PAD yang Sah	-	21,184,550	2,119,880
	2,216,000,000	2,359,507,650	1,477,647,880

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi PAD Tahun 2020 lebih besar Rp. 143.507.650,00 atau 6,48%.

Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, realisasi PAD Tahun 2020 lebih besar Rp. 881.859.770,00 atau naik 59,68% disebabkan karena untuk Retribusi IMB dari target dan realisasi mengalami kenaikan dari tahun 2019 dan Retribusi IMTA mengalami kenaikan realisasi.

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2020 dan 2019 diuraikan sebagai berikut:



1) Realisasi Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi retribusi Daerah pada DPMPTSP Kabupaten Batang tahun anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Hasil Retribusi Daerah:	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1,747,000,000.00	1,561,213,100.00	1,035,385,000.00
Retribusi Trayek	19,000,000.00	11,180,000.00	13,895,000.00
Retribusi IMTA	450,000,000.00	765,930,000.00	426,248,000.00
	-	-	-
	2,216,000,000.00	2,338,323,100.00	1,475,528,000.00
Jumlah Hasil Retribusi	2,216,000,000.00	2,338,323,100.00	1,475,528,000.00

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi hasil retribusi Daerah DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2020 kenaikan Rp. 881.859.770,00 atau 59,68% dibanding Tahun 2019.

Adapun penjelasan masing-masing Retribusi bila dibandingkan dengan anggarannya sebagai berikut :

Retribusi Peijinan Tertentu :

- a) Retribusi ijin Mendirikan Bangunan tidak memenuhi target sebesar Rp. 185.786.900 atau 10,63% disebabkan perusahaan yang sudah masuk ke Kabupaten Batang masih belum selesai proses perijinannya;
- b) Retribusi Trayek juga belum memenuhi target yaitu masih kurang Rp. 7.820.000 atau 41,15% ini dikarenakan berkurangnya jumlah armada yang beroperasi sehingga tidak memperpanjang surat-suratnya dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di masa pandemi;
- c) Retribusi IMTA melebihi dari target sebesar Rp. 315.930.000 atau 70,2% adanya proyek PLTU, yang mana masih dalam tahap konstruksi pihak PT. BPI menambah jumlah Tenaga Kerja Asing.

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain- lain Pendapatan Asli daerah yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang disahkan tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Lain-lain PAD yang Sah	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan denda retribusi		21,184,550	2,119,880



b. Belanja

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja DPMPTSPKabupaten Batang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	4,610,218,323.00	4,448,317,361.00	-	96.49%
2	BELANJA MODAL	1,187,600,000.00	1,154,388,900.00	-	97.20%
	JUMLAH	5,797,818,323.00	5,602,706,261.00	-	96.63%

Berdasarkan rincian di atas dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja tahun 2020 lebih rendah Rp. 195.112.062,00 atau 3,37% Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019 maka realisasi belanja tahun 2020 naik 10,32%.

Perbandingan realisasi belanja daerah tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

		2020		2019	
NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	4,610,218,323.00	4,448,317,361.00	4,328,129,299.00	2.78%
2	Belanja Modal	1,187,600,000.00	1,154,388,900.00	750,257,500.00	53.87%
	JUMLAH	5,797,818,323.00	5,602,706,261.00	5,078,386,799.00	10.32%

Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja

1) BELANJA OPERASI

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang. Belanja operasi DPMPTSPKabupaten Batang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi:	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	2,832,520,040.00	2,788,209,090.00	2,726,377,092.00
Belanja Barang	1,777,698,283.00	1,660,108,271.00	1,601,752,207.00
	4,610,218,323.00	4,448,317,361.00	4,328,129,299.00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi Tahun 2020 lebih rendah Rp. 161.900.962,00 atau 3,51%, Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, realisasi belanja operasi Tahun 2020 lebih besar 2,78%.



a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Belanja Pegawai:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Tidak Langsung:					
Gaji dan Tunjangan	1,825,153,241.00	1,783,442,291.00	97.71	41,710,950.00	2.29
Tambahan Penghasilan PNS	770,366,799.00	770,366,799.00	100.00	-	-
Insentif Pemungutan Retribusi daerah	105,750,000.00	105,750,000.00	100.00	-	-
	2,701,270,040.00	2,659,559,090.00	98.46	41,710,950.00	1.54
Belanja Langsung:					
Honorarium PNS	94,450,000.00	94,450,000.00	100.00	-	-
Honorarium Non PNS	36,800,000.00	34,200,000.00	92.93	2,600,000.00	7.07
Uang Lembur	-	-	-	-	#DIV/0!
Belanja pegawai BLUD	-	-	-	-	-
	131,250,000.00	128,650,000.00	98.02	2,600,000.00	1.98
	2,832,520,040.00	2,788,209,090.00	98.44	44,310,950.00	1.56

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2020 sebesar Rp. 2.788.209.090,00 (98,44%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 44.310.950,00 (1,56%).

b) Belanja Barang

Anggaran dan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Belanja Barang:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Bahan Pakai Habis	171,698,200.00	171,560,200.00	99.92	(138,000.00)	(0.08)
Belanja Jasa Kantor	770,786,000.00	748,374,171.00	97.09	(22,411,829.00)	(2.91)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	174,974,000.00	162,180,200.00	92.69	(12,793,800.00)	(7.31)
Belanja Cetak Dan Penggandaan	84,708,500.00	84,427,250.00	99.67	(281,250.00)	(0.33)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43,650,000.00	43,650,000.00	100.00	-	-
Belanja Makan Minum	173,177,000.00	148,905,000.00	85.98	(24,272,000.00)	(14.02)
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	48,300,000.00	48,300,000.00	100.00	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	171,356,949.00	113,831,500.00	66.43	(57,525,449.00)	(33.57)
Belanja Pemeliharaan	118,850,000.00	118,826,950.00	99.98	(23,050.00)	(0.02)
Belanja Jasa konsultasi	20,197,634.00	20,053,000.00	99.28	(144,634.00)	(0.72)
Jumlah	1,777,698,283.00	1,660,108,271.00	93.39	(117,590,012.00)	(6.61)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja barang pada tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp. 1.601.752.207 atau 99,37% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.209.713 atau 0,63%.

2) BELANJA MODAL

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:



<i>Belanja Modal:</i>	Tahun 2020		Tahun 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	1,187,600,000.00	1,154,388,900.00	750,257,500.00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
	1,187,600,000.00	1,154,388,900.00	750,257,500.00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal Tahun 2020 lebih rendah Rp. 33.211.100,00 atau 2,8%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi belanja modal Tahun 2020 naik sebesar 53,87%.

Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan aktiva tetap.

B. NERACA

Neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akun-akun dalam neraca adalah sebagai berikut :

1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kabupaten Batang yang ada di DPMPTSP Kabupaten Batang terbagi dalam :

<i>Uraian</i>	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1. Aset Lancar	1,843,400.00	2,391,750.00
2. Investasi Jangka Panjang	-	-
3. Aset Tetap	7,683,790,228.00	6,961,028,539.00
4. Aset Lainnya	178,750.00	178,750.00
	7,685,812,378.00	6,963,599,039.00

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa terjadi penambahan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang di DPMPTSP Kabupaten Batang yaitu sebesar Rp. 722.761.689,00 atau 10,38%.

a. ASET LANCAR

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut:



<i>Aset Lancar</i>	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1 Kas di Kasda	-	
2 Kas di Bendahara Pengeluaran	-	
3 Kas di Bendahara Penerimaan	-	
4 Kas di BLUD	-	
5 Kas Lainnya	-	
6 Piutang Pajak Daerah	-	
7 Piutang Retribusi	-	
8 Penyisihan Piutang tak tertagih	-	
9 Belanja Dibayar Dimuka	-	
10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	-	
11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	
12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	
13 Piutang Lainnya	-	
12 Persediaan	1,843,400.00	2,391,750.00
	1,843,400.00	2,391,750.00

1) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 di DPMPTSP Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

<i>Persediaan</i>	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1 Persediaan ATK/Pakai Habis	1,843,400.00	2,391,750.00
2 Persediaan Obat-obatan medis	-	
3 Persediaan Obat-obatan ternak	-	
4 Persediaan Rumah tangga	-	
5 Persediaan Benda Berharga	-	
6 Persediaan Lainnya	-	
	1,843,400.00	2,391,750.00

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masing-masing DPMPTSP Kabupaten Batang. Nilai persediaan lainnya tersebut termasuk nilai persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Sampai tanggal 31 Desember 2020 belum diserahkan kepada masyarakat karena penerima hibah barang belum berbadan hukum.

Berikut penjelasan dari masing-masing persediaan :

- Persediaan alat tulis kantor/Pakai Habis
Persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.843.200,00 dengan perincian terlampir.

b. ASET TETAP

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang berada pada DPMPTSP Kabupaten Batang berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp. 7.748.862.311,00 merupakan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Aset tetap	Saldo awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir(Rp)
Tanah				-
Peralatan dan Mesin	4,014,393,383.00	425,615,700.00	8,140,000.00	4,431,869,083.00
Gedung dan Bangunan	5,373,937,579.00	672,162,500.00	-	6,046,100,079.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	225,409,500.00	124,245,000.00	-	349,654,500.00
Aset tetap lainnya	12,999,972.00		-	12,999,972.00
pengerjaan		198,540,700.00		198,540,700.00
	9,626,740,434.00	1,420,583,900.00	8,140,000.00	11,039,164,234.00

Nilai aset tetap per 31 Desember 2020 di atas, telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang SKPD.

Penambahan nilai aset terdiri atas (1) penambahan aset dari belanja modal; (2) penambahan aset yang berasal dari APBD Provinsi/APBN; (3) penambahan aset dari hibah; (4) penambahan aset dari hasil koreksi aset; (5) penambahan aset tetap dari hasil mutasi antar SKPD; (6) penambahan aset dari bukan belanja modal; (7) penambahan aset dari pindahan antar rekening; dan (8) penambahan aset dari lain-lain.

Pengurangan nilai aset terdiri atas (1) penghapusan aset tetap; (2) pengurangan aset karena mutasi antar SKPD; (3) pengurangan aset karena hibah; (4) pengurangan aset karena koreksi akuntansi hasil kodifikasi; (5) pengurangan aset karena rusak berat; (6) pengurangan aset karena extracomptable; (7) pengurangan aset karena pindahan antar rekening dalam SKPD; dan (8) Pengurangan aset karena lain-lain.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1) Penambahan aset tetap

a) Penambahan aset tetap dari belanja modal.

Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Belanja Modal 2019 (Rp)
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	359,440,700.00
3 Gedung dan Bangunan	472,162,500.00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	124,245,000.00
5 Aset tetap lainnya	
6 Konstruksi dalam pengerjaan	198,540,700.00
	1,154,388,900.00

b) Penambahan Aset dari SKPD lain dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Belanja Modal 2020 (Rp.)
1. Tanah	
2. Peralatan dan Mesin	66.175.000,00
3. gedung dan Bangunan	200.000.000,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5. Aset tetap lainnya	
6. Konstruksi dalam pengerjaan	
	266.175.000,00



Penambahan aset dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang berupa bangunan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang ada didalam gedung MPP Kabupaten Batang dan 2 (dua) buah digital signage dari DPUPR Kab. Batang.

2) Pengurangan Aset tetap

Pengurangan aset tetap karena extracountable tahun 2020 terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Extracountable</i>
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	8,140,000.00
3 Gedung dan Bangunan	
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5 Aset tetap lainnya	
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	8,140,000.00

Rincian aset tetap tahun 2020

1) Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.431.868.983,00 naik sebesar Rp. 417.475.700,00 atau 8,75% dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2019 sebesar Rp.4.014.393.283,00

Berikut daftar rincian peralatan dan mesin berdasarkan 9 jenis peralatan dan mesin:

<i>Peralatan dan Mesin</i>	<i>Neraca Per 31 Des 2020</i>	<i>Neraca Per 31 Des 2019</i>	<i>Naik (turun)</i>
Alat-alat besar	-	-	-
Alat -alat angkutan	1,115,402,214.00	1,115,402,214.00	-
alat-alat bengkel dan alat ukur	-	-	-
alat-alat pertanian dan peternakan	2,656,500.00	2,656,500.00	-
alat-alat kantor dan rumah tangga	2,133,090,902.00	2,716,569,903.00	(583,479,001.00)
alat-alat studio dan komunikasi	182,914,666.00	169,764,666.00	13,150,000.00
alat-alat kedokteran	-	-	-
alat-alat laboratorium	3,000,000.00	-	3,000,000.00
alat kewanan	-	10,000,000.00	(10,000,000.00)
komputer	976,251,701.00	-	-
alat keselamatan kerja	18,553,000.00	-	18,553,000.00
	4,431,868,983.00	4,014,393,283.00	(558,776,001.00)

Nilai peralatan dan mesin pada tahun 2020 berasal mutasi penambahan dan mutasi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

a) Mutasi penambahan

Mutasi penambahan peralatan dan mesin tahun 2020 sebesar Rp. 351.300.00,00 terdiri dari :

- (1) Belanja Modal sebesar Rp. 351.300.700,00
- (2) Selain Belanja Modal ada Reklas migrasi 108 dan Reklas antar rekening.



b) Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan nilai aset peralatan dan mesin pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.140.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Mutasi Kurang (Rp)

1 Hibah	
2 Koreksi	
3 Rusak Berat	
4 Extracountable	8,140,000.00
5 Reklasifikasi	-
6 Mutasi ke SKPD lain	-
Rp	8,140,000.00

2) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca DPMPTSP Kabupaten Batang per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.046.100.079,00 naik sebesar Rp. 672.162.500,00 atau 12,51% sedang nilai di neraca 2019 adalah Rp. 5.373.937.579,00 kenaikan berasal dari Belanja Modal yang berupa renovasi toilet MPP, bangunan Drive Thru SIM dan mutasi dari Disnaker Kabupaten Batang berupa bangunan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSA).

3) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 349.654.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 124.245.000,00 atau 55,12% dari nilai yang tersaji pada neraca 2019 sebesar Rp.225.409.500,00 Berikut daftar rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam neraca 2020:

<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	neraca per 31 Des 2020	neraca per 31 Des 2019	Naik (turun)
Jalan dan Jembatan	153,484,500.00	153,484,500.00	-
Bangunan air	-	-	-
Instalasi	151,265,000.00	52,135,000.00	99,130,000.00
Jaringan	44,915,000.00	19,800,000.00	25,115,000.00
	349,664,500.00	225,419,500.00	124,245,000.00

4) Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan di neraca DPMPTSP Kabupaten Batang per 31 Desember 2020 sebesar Rp.12.999.972,00 sama dengan aset tetap lainnya yang disajikan dalam neraca 2019.

Berikut daftar rincian aset tetap lainnya berdasarkan jenisnya:

<i>Aset Tetap Lainnya</i>	neraca per 31 Des 2020	neraca per 31 Des 2019	Naik (turun)
Buku dan Kepustakaan	12,999,972.00	12,999,972.00	-
Barang Bercorak Seni			
Kebudayaan	-	-	-
Hewan, ternak dan			
Tumbuhan	-	-	-
	12,999,972.00	12,999,972.00	-



3) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2020 dan perbandingannya dengan restatement neraca tahun 2019 sebagai berikut :

	Neraca Per 31 Des 2020	Neraca Per 31 Des 2019 (AUDITED)	Naik (turun)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.289.199.006)	(2.665.711.795)	(623.487.211,00)
	(3.290.301.923)	(2.665.711.795,00)	(624.590.128,00)

c. ASET LAINNYA

Akun ini menggambarkan nilai tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, piutang retribusi, aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan rincian saldo per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

SKPD	Neraca Per 31 Des 2020	Neraca Per 31 Des 2019	Naik (turun)
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak ketiga	-	-	-
Aset tak Berwujud	-	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset lain-lain	178,750.00	178,750.00	-
	178,750.00	178,750.00	-

1. KEWAJIBAN

Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batang. Sampai dengan 31 Desember 2020, kewajiban DPMTSPKabupaten Batang terdiri dari:

Uraian	Neraca Per 31 Des 2020	Neraca Per 31 Des 2019	Naik (turun)
Kewajiban Jangka Pendek	497,627,376.00	238,367,700.00	259,259,676.00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	497,627,376.00	238,367,700.00	259,259,676.00

a. Kewajiban Jangka Pendek

Akun kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek DPMTSPKabupaten Batang Tahun 2020 terdiri dari:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Kewajiban Jangka Pendek:	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Hutang Bunga	-	-
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan di terima dimuka	416,169,125.00	161,735,000.00
Hutang Belanja	81,458,251.00	76,632,700.00
Hutang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	497,627,376.00	238,367,700.00

Penjelasanrincinya sebagai berikut :

1) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang belum menjadi hak pemerintah Daerah namun telah diterima di tahun 2020 sebesar Rp.416.169.125,00dari pendapatan retribusi Rp.161.735.000,00

2) Hutang Belanja.

Meliputi Utang listrik, telpon, air dan TPP bulan Desember2020 yang baru dibayar bulan Januari 2020sebesar Rp.81.458.251,00

2. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban DPMP TSP Kabupaten Batang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Ekuitas	7,188,185,002.00	6,725,231,339.00
	7,188,185,002.00	6,725,231,339.00

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pada tahun 2020 Pendapatan-LO DPMP TSP Kabupaten Batang direalisasikan sebesar Rp.2.105.073.525,00apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO pada tahun 2019 sebesar Rp.1.663.136.105,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.441.937.420,00atau 26,5%.

Perbandingan Realisasi Pendapatan-LO pada tahun 2020 dengan tahun 2019 sebagai berikut :



	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	2,083,888,975.00	1,661,016,225.00	422,872,750.00	25.46%
Pendapatan Transfer	-	-	-	#DIV/0!
Lain-lain Pendapatan yang Sah	21,184,550.00	2,119,880.00	19,064,670.00	899.33%
	2,105,073,525.00	1,663,136,105.00	441,937,420.00	26.57%

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun Pendapatan Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2019, dengan kenaikan tertinggi ada pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.19.064.670,00.

Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah:

<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
1 Pajak Daerah	-	-	-	
2 Hasil Retribusi Daerah	2,083,888,975.00	1,661,016,225.00	422,872,750.00	25.46%
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	#DIV/0!
4 Pendapatan Asli Daerah lainnya	21,184,550.00	2,119,880.00	19,064,670.00	899.33%
	2,105,073,525.00	1,663,136,105.00	441,937,420.00	26.57%

Berdasarkan rincian Pendapatan Asli Daerah di atas ada kenaikan pendapatan.

1) Pendapatan Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari :



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Hasil Retribusi Daerah:	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan	-	-	-	#DIV/0!
Retr bi cetak KK,KTP & akte Capil	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jln	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pengujian Kendrn Bermotor	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pengendalian Menara	-	-	-	#DIV/0!
	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi terminal	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Siaran Radio Abirawa	-	-	-	#DIV/0!
	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1,561,213,100.00	1,035,385,000.00	525,828,100.00	50.79%
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Izin Trayek	11,180,000.00	13,895,000.00	(2,715,000.00)	19.54%
Retribusi Izin Usaha	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi IMTA	765,930,000.00	426,248,000.00	339,682,000.00	79.69%
	2,338,323,100.00	1,475,528,000.00	862,795,100.00	58.47%
Jumlah Hasil Retribusi Daerah	2,338,323,100.00	1,475,528,000.00	862,795,100.00	58.47%

Pendapatanretribusi yang diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp.2.338.323.100,00 sedangkan berdasarkan hak yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebesar Rp.2.083.888.975,00 Terdapat selisih sebesar Rp.254.434.125,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Daerah	Penerimaan Kas (LRA)	Piutang 2020	Piutang 2019	Pendapatan diterima dimuka 2019	Pendapatan diterima dimuka 2020	Total
Retribusi Jasa Tertentu						
Retribusi IMB	1,561,213,100					1,561,213,100
Retribuai Trayek	11,180,000					11,180,000
Retribusi IMTA	765,930,000			161,735,000	416,169,125	511,495,875
						-
Jumlah	2,338,323,100	-	-	161,735,000	416,169,125	2,083,888,975

Pada tahun 2020 pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 2.083.888.975,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.422.872.740,00 dari semula tahun 2019 sebesar Rp.1.661.016.235,00.

2) Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Akun Pendapatan Asli Daerah lainnya merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan Asli



Daerah lainnya yang diterima selama tahun 2020 adalah sebesar Rp.21.184.550,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.,00 atau 90% bila dibandingkan dengan yang diterima pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.2.119.880,00 Berikut rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya selama tahun 2020 :

<i>Pendapatan Asli Daerah Lainnya</i>	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan	-	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Jasa Giro	-	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Bunga Deposito	-	-	-	#DIV/0!
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	-	-	-	#DIV/0!
Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Denda Retribusi	21,184,550.00	2,119,880.00	19,064,670	899.33%
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Dari Pengembalian	-	-	-	#DIV/0!
Fasilitas Sosial dan fasilitas umum	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan BLUD	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan BPJS Keshkn	-	-	-	#DIV/0!
	21,184,550.00	2,119,880	19,064,670	899.33%

2. BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer dan beban lain-lain.

Selama tahun 2020, beban DPMP TSP Kabupaten Batang adalah sebesar Rp. 5.085.318.473,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp.4.696.951.503,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp.388.366.970,00 atau 8,27%.

Berikut realisasi beban 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 :

<i>Beban</i>	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	2.660.160.215	2.473.632.032	186.528.183	107,54
Beban Persediaan	172.108.550	178.973.550	(6.865.000)	(96,16)
Beban Jasa	1.234.723.847	1.144.740.473	89.983.374	107,86
Beban Pemeliharaan	281.007.150	221.006.609	60.000.541	127,15
Beban Perjalanan Dinas	113.831.500	307.611.050	(193.779.550)	37,01
Beban Penyusutan	624.590.128	370.987.777	253.602.351	168,36
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	#DIV/0!
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Beban Barang dan Jasa	-	-	-	#DIV/0!
	5.086.421.390	4.696.951.491	389.469.899	108,29



a. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.2.660.160.215,00 apabila dibandingkan dengan beban pegawai pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.2.473.632.032,00 mengalami penurunan sebesar Rp.186.528.183,00 atau naik sebesar 7,54%.

Rincian beban pegawai tersebut terdiri dari :

<i>Beban Pegawai</i>	Nominal (Rp)
Gaji dan Tunjangan PNS	1,783,442,291.00
Tambahan Penghasilan PNS	770,366,799.00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimp & Angg DPRD Serta KDH/WKDH	
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	105,750,000.00
Uang Lembur	-
Belanja Pegawai BLUD	
TPP Desember 2020	64,400,000.00
	2,723,959,090.00
TPP Desember 2019	63,798,875.00
Jumlah	2,660,160,215.00

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.

Beban persediaan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.172.108.550,00 sedangkan pada tahun 2019 beban persediaan adalah sebesar Rp.178.973.550,00 sehingga berkurang sebesar Rp.6.865.000,00 atau 3,84%. Beban Persediaan terdiri dari :

Bahan Pakai Habis	171,560,200.00
Bahan Material	-
Cetak dan Penggandaan	
Jasa Konsultasi	
Belanja brg dan jasa yg diserahkan ke masy	-
Persediaan Desember 2019	2,391,750.00
	173,951,950.00
Persediaan Desember 2020	1,843,400.00
Jumlah	172,108,550.00

c. Beban Jasa

Beban jasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah.

Beban jasa pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.234.723.847,00 sedangkan pada tahun 2019 beban jasa adalah sebesar Rp.1.144.740.473,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp.89.983.374,00 atau naik 7,86%.

Beban Jasa terdiri dari :



Beban Jasa	Nominal (Rp)
Honorarium PNS	94,450,000.00
Honorarium Non PNS	34,200,000.00
Jasa Kantor	748,374,171.00
Premi Asuransi	
Cetak dan Penggandaan	84,427,250.00
Sewa	43,650,000.00
Makan Minum	148,905,000.00
Pakaian dinas	48,300,000.00
Belanja Kursus dan Sosialisasi	
Jasa Konsultasi	20,053,000.00
Survey dan Penyusunan Design	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	
Belanja JKN	
Uang yang diberikan ke	
Barang Extracountable	8,140,000.00
Belanja Telp, listrik air 2020	17,058,251.00
	1,247,557,672.00
Belanja Telp, listrik air 2019	12,833,825.00
	1,234,723,847.00

d. Beban Pemeliharaan.

Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah yang bersifat tidak menambah nilai.

Beban pemeliharaan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.281.007.150,00 sedangkan pada tahun 2019 beban pemeliharaan adalah sebesar Rp.221.006.609,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp.60.000.541,00 atau naik sebesar 27,15%.

Beban pemeliharaan tahun 2020 terdiri dari :

Beban Pemeliharaan	Nominal (Rp)
Perawatan Kendaraan bermotor	162,180,200.00
Pemeliharaan gedung, dll	118,826,950.00
	281,007,150.00

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas pada tahun 2020 terealisasi adalah sebesar Rp.113.831.500,00 sedangkan pada tahun 2019 beban perjalanan dinas adalah sebesar Rp.307.611.050,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp.193.779.550,00 atau naik sebesar 62,99%.

Beban Perjalanan Dinas	Nominal (Rp)
Belanja kursus, pelatihan dan sosialisasi	
Pakaian Dinas	
Perjalanan Dinas	113,831,500.00
	113,831,500.00



f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.624.590.390,00 sedangkan pada tahun 2019 beban penyusutan adalah sebesar Rp.370.987.777,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 253.602.339,00 atau naik sebesar 68,36%

3. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Dalam kegiatan operasional Tahun 2020, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp.2.105.073.525,00 dan realisasi beban Rp. 2.980.244.948,00 Apabila dibandingkan dengan surplus/defisit tahun 2019 sebesar Rp.3.033.815.398,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp.53.570.450,00 atau naik sebesar 1,77%. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini :

<i>Uraian</i>	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	2.105.073.525,00	1.663.136.105,00	441.937.420,00	26,57%
Beban	5.086.421.390,00	4.696.951.503,00	389.469.887,00	8,29%
Jumlah	(2.981.347.865,00)	(3.033.815.398,00)	52.467.533,00	-1,73%

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.725.231.339,00,00 Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2019.

2. Surplus/Defisit –LO

Surplus/Defisit-LO DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2020 adalah sebesar Rp.2.981.347.864,00 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO.

3. Koreksi Ekuitas Lainnya.

Koreksi kesalahan mendasar tahun 2020 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas tahun 2020.

Koreksi-koreksi tersebut sebesar Rp.3.509.373.611,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

	31 Desember 2020 (Rp)
1 Penambahan aset tetap	200,000,000.00
2 Penambahan aset tetap dari pindahan antar rekening	-
3 Pengurangan aset tetap	-
4 Pengurangan aset tetap dari pindahan antar rekening	-
5 Perhitungan akumulasi penyusutan AT yang dihapuskan	-
6 Perhitungan akumulasi penyusutan AT ke SKPD lain	-
7 Perhitungan akumulasi penyusutan AT dari SKPD SKPD lain	-
8 Perhitungan akumulasi penyusutan AT ke Aset Lainnya	-
9 Perhitungan hutang Retensi	-
10 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	-
11 Perhitungan hutang jangka pendek lainnya	-
12 Surplus/Defisit LRA	3,243,198,611.00
	<u>3,443,198,611.00</u>

Untuk penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2020 hanya pada penambahan aset tetap yang berasal dari SKPD lain sebesar Rp. 200.000.000,00

4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 7.188.185.002,00 dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2019 sebesar Rp. 6.725.231.339,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp. 462.953.663,00 atau naik sebesar 6,88%.



BAB V

PENUTUP

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Batang dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2020 pada DPMPTSP Kabupaten Batang. Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2020. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang, 2 Januari 2021

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN BATANG



SP. BUDI WANINGSIH, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19670330 199203 2 004